

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pendidikan pesantren di Indonesia telah mengindikasikan peranan yang signifikan untuk mengembangkan karakter serta mutu sumber daya manusia. Perencana pembelajaran di pesantren disusun untuk menanamkan prinsip-prinsip Islam yang kokoh, sekaligus memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya kepada para santri. Pesantren menyajikan kurikulum yang mendalam dalam kajian Islam, termasuk tafsir Al-Quran, *hadits*, *fiqh*, *akidah* dan *akhlaq*. Selain itu, pesantren juga menciptakan suasana yang mendukung untuk belajar dan menerapkan ajaran agama, dengan penekanan pada pengembangan karakter yang baik dan moral yang luhur. Sistem kepengasuhan di dalam lingkungan pondok pesantren, santri mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang ajaran Islam melalui pengajaran nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kemandirian, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang diatur sedemikian rupa untuk mendukung praktik ajaran Islam secara menyeluruh. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pesantren adalah tempat pembentukan karakter serta *akhlak* yang baik.

Lembaga pendidikan pesantren yang berfungsi sebagai asrama adalah sebuah komunitas yang diatur dan dipimpin oleh kyai atau ulama, dengan bantuan beberapa ustadz yang tinggal dan hidup bersama santri dalam satu lingkungan yang sama. Di dalam komunitas ini, masjid ataupun surau berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan gedung-gedung ataupun ruangan menjadi tempat bagi mereka untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar setiap harinya. Pondok juga berfungsi sebagai tempat tinggal santri selama mereka menuntut ilmu di pondok, di mana mereka hidup secara kolektif layaknya satu keluarga dari waktu ke waktu. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan yang signifikan dan vital dalam menyebarkan

ilmu-ilmu Islam, mencetak ulama, menjaga pengetahuan, dan melestarikan tradisi Islam, bahkan dalam pembentukan serta perkembangan masyarakat Muslim (Azra: 2011; 184-185).

Karakteristik pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara dengan ciri khas seperti *kiai*, *kitab kuning*, ruangan *pesantren* dan santri. Pesantren telah menunjukkan perannya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter masyarakat Muslim tradisional. Pada kajian sejarah pesantren, pesantren juga disebut sebagai pilar *civilizational discourse* yang mendukung moderasi dan nilai toleransi dalam konteks Indonesia yang multikultural. (Rois et al., 2023). Pesantren merupakan inspirator sekaligus satu-satunya acuan pembentukan karakter dan Akhlakul Karimah. (Rostini et al., 2020). Beberapa studi menyoroti pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan peradaban Islam, serta tantangan dalam menerjemahkan nilai tradisional pesantren ke dalam konteks pendidikan modern. (Agus, 2024)

Pesantren berfungsi sebagai elemen dalam struktur masyarakat yang secara keseluruhan berkontribusi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar memiliki idealisme, keahlian intelektual, dan etika yang baik untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa. Sebagai lembaga pendidikan yang lahir serta berkembang di masyarakat, pesantren mengusung nilai-nilai yang melekat pada pendidikan Islam di Indonesia. Secara aspek kelembagaan, setidaknya pesantren terdiri dari 5 (lima) elemen pokok, yakni: kyai, santri, masjid, pondok, serta kitab kuning (literatur klasik). Ciri khas pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah penanaman nilai-nilai ketaatan santri kepada kyai, gaya hidup sederhana, kemandirian, semangat saling membantu dan persaudaraan, serta disiplin (Hariadi: 2015: 78 dan Mas'ud: 2020: 14).

Namun demikian, tidak semua lulusan pesantren menjadi ulama atau kiai, dan memilih bekerja di bidang keagamaan. Oleh karena itu, santri juga perlu diberikan keterampilan hidup yang beragam berupa keahlian seperti

pendidikan teknis dan keterampilan bertahan hidup, yang merupakan bagian dari pendidikan *life skill*, yang diajarkan kepada santri sebelum mereka aktif di tengah masyarakat. Pesantren terbukti ikut berperan serta memperkuat sistem pendidikan nasional dengan bantu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai pengetahuan serta teknologi, namun tetap diiringi nilai-nilai keagamaan yang baik. Menurut Dhofir (2011), pesantren sudah menjadi pusat unggul (*center of exelent*) dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki dasar moral pada kehidupan sosial. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pesantren secara ideal dan nyata mampu berperan aktif untuk mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik dan sejahtera (Siswanto: 2015).

Seiring dengan berkembang dan dinamika, pesantren menghadapi tuntutan peningkatan kualitas pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, pesantren perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki mutu pendidikannya. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pesantren selama ini, dianggap kurang efektif, karena lebih mengutamakan faktor input. Pandangan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan di pesantren tidak hanya fokus pada penyediaan input pendidikan, namun juga memperhatikan proses pendidikan yang berlangsung. Sistem pendidikan di pesantren disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Perubahan arah pendidikan di pesantren ialah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Model pendidikan pesantren diyakini masih berfungsi sebagai sarana strategis untuk mengubah masa depan, mampu berkolaborasi dengan transformasi sosial, serta dapat memengaruhi arah pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan pesantren akan terwujud dengan baik jika pesantren dapat merancang sistem pendidikannya selaras dengan standar mutu pendidikan yang berlaku saat ini.

Sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren berasal dari inisiatif masyarakat yang diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem pendidikan nasional), yang kemudian

diperbarui melalui PP Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Saat ini, pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tradisional (Salafiyah) yang menekankan pada studi teks-teks keagamaan klasik, tetapi juga pendidikan modern yang menggabungkan ilmu agama, sains, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang peran masyarakat pada pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan pada Pasal 54, yaitu: (1) Peran masyarakat dalam pendidikan mencakup peran individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian kualitas pelayanan pendidikan (2) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selain itu, pendidikan berbasis masyarakat juga diatur dalam Pasal 55, yaitu: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dalam pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ciri khas agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat bertugas mengembangkan dan melaksanakan kurikulum serta evaluasi pendidikan, serta mengelola manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan (3) Dana untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat menerima bantuan teknis, subsidi dana, serta sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Terdapat model lembaga pendidikan pesantren yang memiliki asrama (pondok) atau tanpa asrama, yang pada umumnya mencakup Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Demikian pula. pondok

pesantren ada yang menyelenggarakan semua jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi, namun tidak sedikit yang hanya menyelenggarakan pendidikan untuk satu jenjang pendidikan saja. Sebagian besar pondok pesantren menyediakan asrama bagi santrinya (siswanya). Bentuk pesantren khusus yaitu pesantren *salafiyah* yang tidak memiliki jenjang pendidikan dan tidak berikan ijazah ataupun Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikannya.

Teks akademik. Parafrase. Sitasi gaya APA. Baik. Aktivitas favorit umat manusia: mengucapkan hal yang sama dengan cara berbeda supaya terlihat baru. Mari kita lakukan dengan elegan.

Perubahan kebijakan mengenai otonomi pendidikan mendorong perhatian yang semakin besar terhadap pendekatan **Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM)**. Dalam konteks Indonesia, pondok pesantren menghadirkan contoh konkret yang relevan karena lembaga ini lahir dari dinamika sosial warga, dikelola oleh komunitas, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sejak tahap perintisan, pembiayaan, hingga pengembangan kelembagaan, keterlibatan masyarakat berlangsung kuat dengan kiai sebagai figur sentral yang memiliki otoritas moral, intelektual, dan manajerial (Azra, 2012).

PBM pada dasarnya dipahami sebagai gerakan pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat terus belajar sepanjang hayat. Orientasi tersebut penting karena tantangan sosial, ekonomi, dan kultural berkembang semakin kompleks sehingga warga memerlukan kapasitas adaptif yang berkelanjutan (Kindervatter, 1979).

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat didasarkan pada tiga prinsip pokok, yakni **dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat**. Pendidikan *dari* masyarakat menegaskan bahwa program yang diselenggarakan harus merespons kebutuhan nyata komunitas. Pendidikan *oleh* masyarakat menempatkan warga sebagai pelaku utama dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Sementara itu, pendidikan *untuk* masyarakat menuntut agar seluruh rancangan program bermuara pada pemenuhan aspirasi dan peningkatan kualitas hidup mereka (Tilaar, 2004). Melalui kerangka ini, pesantren berperan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat perubahan sosial yang mengintegrasikan tradisi, kemandirian, dan keterlibatan masyarakat (Zubaedi; 2009: 132).

Secara ringkas, dikemukakan bahwa komunitas perlu diperkaya kemampuannya, diberikan kesempatan serta kebebasan untuk merancang, menyusun rencana, membiayai, mengatur, dan mengevaluasi secara mandiri apa yang dibutuhkan secara spesifik di dalam, untuk, dan oleh komunitas itu sendiri. Pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*) berarti komunitas diberi ruang untuk menyelenggarakan pendidikan, yang mengandung makna bahwa kesempatan besar yang disediakan oleh pemerintah sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Esensi pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus sesuai dengan harapan sosial. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak ditempatkan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memikul tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan dan pengembangan pendidikan. Partisipasi tersebut terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menumbuhkan, memelihara, serta memperluas dinamika pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan nyata lingkungan sosialnya. Ketiadaan dukungan masyarakat akan menyebabkan penyelenggaraan pendidikan kehilangan makna dan legitimasi. Oleh karena itu, masyarakat dapat dipahami sebagai kekuatan utama yang berada di garis depan dalam menjamin kontinuitas sekaligus arah perkembangan pendidikan. Dengan keterlibatan kolektif tersebut, proses pendidikan diharapkan tidak hanya berlangsung dengan institusional, namun juga berakar kuat pada aspirasi serta kepentingan publik yang dilayaninya (Suharto., et al., 2024).

Dalam Permen Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 ayat 38 dikemukakan bahwasanya Baik. Kita ubah tanpa menghilangkan isi, makna, dan napas akademiknya. Pendidikan berbasis masyarakat ialah penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada keunikan nilai keagamaan, kondisi sosial, budaya, aspirasi, serta potensi yang hidup di tengah warga. Model ini menempatkan pendidikan sebagai proses yang lahir dari masyarakat, dikelola bersama masyarakat, serta ditujukan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Penekanan utama pendekatan ini terletak pada tingkat rasa memiliki publik terhadap lembaga dan proses pendidikan yang berjalan. Komunitas memperoleh ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai komponen mendasar, seperti perumusan tujuan, penetapan sasaran, pengelolaan pembiayaan, pengembangan kurikulum, penentuan standar mutu dan mekanisme evaluasi, kualifikasi pendidik, kriteria peserta didik, hingga pemilihan lokasi penyelenggaraan. Keterlibatan luas tersebut menjadi penanda bahwa pendidikan benar-benar berakar pada masyarakat. Sebaliknya, apabila keseluruhan aspek tersebut sepenuhnya ditetapkan oleh otoritas pemerintah tanpa partisipasi berarti dari warga, maka penyelenggaraannya lebih tepat dipahami sebagai pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, bukan sebagai pendidikan berbasis masyarakat. Data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, terdapat 30.494 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 2020/2021, ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2
Jenis Pondok Pesantren di Indonesia

No	Tipe	Jumlah dan Persentase	
		Jumlah	Persen %
1	Salafiyah (Tradisional)	14446	47,37
2	Ashriyah (Modern)	5133	16,83
3	Kombinasi	10915	35,79
Jumlah		30494	100

Sumber Data: Ditjen PAIS Kemenag RI. Tahun 2020/2021

Tabel diatas, dilihat dari jumlah pondok pesantren dan santri memperlihatkan bahwa sebagian besar pondok pesantren 47,37% merupakan pondok pesantren tradisional, 16,83% merupakan pondok pesantren moder dan 35,79% merupakan pondok pesantreen yang mengkombinasikan terdisi pesantren dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan keadaan. Jumlah pondok pesantren terbesar masih didominasi pulau Jawa. Di samping, faktor demografik berkaitan dengan besaran penduduk di Jawa, juga terdapat persepsi bahwa pulau Jawa merupakan tempat yang ideal untuk pesantren dikarenakan banyaknya alim ulama besar yang berada di pulau Jawa.

Teks itu pada dasarnya sedang memetakan ragam orientasi pendidikan pesantren dari yang fokus murni ke agama sampai yang mulai akrab dengan urusan dunia nyata seperti keterampilan kerja. Baik, mari kita rapikan tanpa mengubah ruhnya.

Jika ditinjau dari sisi partisipasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan di pondok pesantren, pertumbuhan jumlah pesantren menunjukkan adanya keragaman orientasi. Sebagian pesantren masih menempatkan *tafaqquh fiddin* sebagai fokus utama dengan penekanan pada pendalaman serta pemahaman ilmu-ilmu keagamaan. Di sisi lain, berkembang pula pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, namun juga berikan pengetahuan umum, keterampilan praktis, dan kecakapan hidup, misalnya melalui program agribisnis maupun pelatihan industri skala kecil. Selain dua kecenderungan tersebut, terdapat pula model pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan formal dalam bentuk sekolah berasrama atau madrasah terpadu, yang pada beberapa tahun terakhir alami perkembangan cukup pesat.

Dengan mempertimbangkan berbagai variasi pondok pesantren, mulai dari skala infrastruktur, jumlah santri, sebaran potensi wilayah, fokus muatan pendidikan, hingga tingkat interaksi antara pesantren dan masyarakat, penelitian ini difokuskan pada pondok pesantren yang berorientasi pada

*tafaqqu*l *fiddiin* sekaligus pemberian keterampilan praktis. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana penyelenggaraan pendidikan di pesantren tersebut. Selain itu, penelitian ingin mengetahui bagaimana pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan alternatif berbasis masyarakat (*community-based*), mengembangkan *life skills* lulusannya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.

Keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan yang dibangun melalui partisipasi masyarakat, telah diakui dalam undang-undang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan evaluasi program pendidikan pada pesantren. Keterlibatan masyarakat tercermin dalam bentuk dukungan sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan. Aturan tersebut akan memastikan keberlanjutan serta keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat serta diintegrasikan pada sistem pendidikan nasional (Ahmad et al., 2023).

Saat ini pesantren menghadapi banyak rintangan dalam pelaksanaan kurikulum, seperti perbedaan antara kurikulum tradisional dan kebutuhan zaman sekarang, serta minimnya standarisasi dalam penerapan kurikulum di berbagai lokasi. Selain itu, terbatasnya infrastruktur pendidikan, kekurangan pengajar yang berkualitas, dan kesulitan akses terhadap teknologi modern menjadi kendala untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Untuk atasi tantangan ini, diperlukan usaha untuk merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif, serta memperkuat kerjasama antara pesantren, pemerintah, dan institusi pendidikan lainnya. Dengan strategi yang tepat, sistem pendidikan pesantren dapat terus maju dan berkontribusi dalam menghasilkan generasi yang unggul, baik di bidang spiritual maupun akademis. Pesantren juga berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal, di mana para santri dibimbing dan dilatih untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuan hidup yang sesuai dengan bakat masing-masing. Menurut Indrajati Sidi (2002) Kecakapan hidup mencakup lebih dari sekadar keterampilan kerja dan dapat dibagi

menjadi lima kategori, yakni: (1) kemampuan untuk memahami diri sendiri (*self awareness*) yang juga dikenal sebagai keterampilan pribadi (*personal skill*), (2) kemampuan berpikir logis (*thinking skill*), (3) kemampuan bersosialisasi (*social skill*), (4) kemampuan akademik (*academic skill*), dan (5) kemampuan profesional (*vocational skill*). Tiga kemampuan pertama disebut keterampilan hidup umum (*General Life Skill/GLS*), sedangkan dua kemampuan terakhir dinamakan keterampilan hidup khusus (*Specific Life Skill/SLS*). Dalam kenyataan, kemampuan hidup (GLS dan SLS), kemampuan mengenali diri, berpikir logis, kemampuan sosial, akademik, maupun profesional tidak berfungsi secara terpisah atau eksklusif. Sebaliknya, kemampuan-kemampuan tersebut saling terintegrasi dan berkolaborasi, membentuk tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Kualitas tindakan individu ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan dari berbagai aspek pendukung tersebut.

Problematika yang terjadi pada pondok pesantren salafiyah yang belakangan ini mengalami kemunduran. Penurunan perkembangan pesantren salafiyah disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren salafiyah, meskipun pesantren ini telah menghasilkan banyak tokoh berpengaruh di Indonesia. Namun, masyarakat saat sekarang ini memiliki pandangan bahwa lulusan pesantren salafiyah kurang diminati, dan tak ada jaminan masa depan dibandingkan dengan pendidikan formal. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan (*Educative Approach*), Pondok Pesantren senantiasa berupaya untuk memperbaharui konsep dasarnya dan meningkatkan partisipasi dari seluruh civitas lembaga dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan (Sumber Daya Manusia/SDM), serta dalam aspek pembangunan material dan spiritual.

Beberapa cintra negatif terhadap keberadaan pesantren misalnya isu radikalisme dan terorisme yang dibenturkan dengan eksistensi pesantren di

Indonesia. Jika ditelaah secara mendalam, isu tersebut akan menegangkan kerekatan kultural antara pesantren dengan masyarakat yang sudah lama dibangun dan tentunya akan mengarah pada disintegrasi umat Islam, sehingga integritas umat Islam sebagai kekuatan sosial akan terfragmentasi oleh konflik internal akibat isu yang tidak jelas tersebut (Ansory, 2023). Isu radikalisme dan terorisme di pesantren mendorong kehadiran peran pesantren dalam membangun *Islam moderat*, sebagai upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme, termasuk pembentukan perilaku toleran bagi santri. (Behavior et al., 2024). Padahal di sisi lain pesantren telah berperan dalam wacana moderasi beragama karena konsisten mengajarkan nilai-nilai etika Islam yang menjaga dan membentengi para santri dari pemahaman agama yang menyimpang. (Hidayatulloh et al., 2024).

Jika ditinjau dari sisi partisipasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan di pondok pesantren, pertumbuhan jumlah pesantren menunjukkan adanya keragaman orientasi. Sebagian pesantren masih menempatkan *tafaqquh fiddin* sebagai fokus utama dengan penekanan pada pendalaman serta pemahaman ilmu-ilmu keagamaan. Di sisi lain, berkembang pula pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan pengetahuan umum, keterampilan praktis, dan kecakapan hidup, misalnya melalui program agribisnis maupun pelatihan industri skala kecil. Selain dua kecenderungan tersebut, terdapat pula model pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan formal dalam bentuk sekolah berasrama atau madrasah terpadu, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup pesat.

Masih adanya kajian tentang perilaku perundungan di pesantren sebagaimana hasil penelitian oleh Fadhilah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa santri pondok pesantren lebih banyak tidak melakukan perilaku *bullying* (65%) dari yang melakukan (35%). Aspek dominan pada yang melakukan *bullying* adalah secara tidak langsung dan yang tidak melakukan *bullying* adalah

fisik. Santri yang punya dan tidak punya geng lebih banyak yang tidak melakukan perilaku *bullying*.

Terdapat beberapa kesenjangan yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian tentang manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan *life skill* pada pondok pesantren, di antaranya: *pertama*, pesantren menargetkan santri memiliki kemandirian, keterampilan hidup, dan kesiapan menghadapi dunia kerja/masyarakat, namun demikian implementasi *life skill* masih terfokus pada aspek religius dan kedisiplinan, sementara keterampilan vokasional atau soft skills belum terprogram secara sistematis. (Muiz, 2024) 2). *Kedua*, era digital dan industri membutuhkan kemampuan teknologi, komunikasi, kreativitas, problem solving, dan entrepreneurship. Kenyataan, kurikulum banyak pesantren masih berorientasi pada pembelajaran kitab, belum mengintegrasikan kompetensi abad 21 secara komprehensif. (Prayoga et al., 2019). *Ketiga*, potensi SDM pengajar dan kompetensi mengajar *life skill* diharapkan pesantren memiliki pembina/guru yang mampu membimbing keterampilan vokasional maupun soft skill. Faktanya, banyak ustadz hanya ahli pada bidang keagamaan, minim pelatihan *life skill* dan pelatihan pedagogik modern dan kurangnya mentor profesional (misal kewirausahaan, pertanian modern, IT). *Ke-empat*, program *life skill* memerlukan fasilitas memadai seperti workshop, laboratorium komputer, kebun praktik, ruang tata boga, perbengkelan, atau studio digital. Kenyataannya. banyak pesantren memiliki fasilitas terbatas, peralatan tidak standar industri dan tidak ada alokasi dana khusus untuk pengembangan *life skill*. Adanya kesenjangan program *life skill* dengan kebutuhan santri di mana santri membutuhkan keterampilan yang relevan dengan minat dan peluang kerja. Sementara itu, program bersifat seragam, tidak memperhatikan minat dan bakat santri, tidak ada asesmen kompetensi awal dan akhir, dan *life skill* cenderung bersifat tambahan, bukan kebutuhan utama. Program *life skill* membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta monitoring berkelanjutan. Sedangkan di pesantren pada umumnya, evaluasi pendidikan *life skill* sering tidak terstruktur, tidak ada indikator keberhasilan yang jelas, dan

output santri tidak terdokumentasi secara profesional (portofolio, sertifikasi, dll.).

Adapun beberapa karakteristik khusus yang mendasari dipilihnya pondok pesantren As-Shiddiqiyah Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Pondok Pesantren An-Najah Cikoleang Rumpin Bogor adalah:

1. Karakteristik khusus Pondok pesantren As-Shiddiqiyah Jakarta

Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah memiliki orientasi kelembagaan yang kuat terhadap pembaruan sistem pendidikan. Komitmen tersebut tercermin pada kesiapan para pengasuh, pembina, serta tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan reformulasi berbagai sistem yang ada, baik pada aspek pembelajaran, tata kelola kelembagaan, maupun manajemen organisasi. Upaya modernisasi dilakukan secara selektif pada sejumlah subsistem sebagai prasyarat keberlanjutan (*institutional sustainability*) pesantren, khususnya dalam pengelolaan unit pendidikan formal hingga jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu, pesantren menerapkan model kurikulum terintegrasi yang memadukan tradisi kepesantrenan dengan sistem pendidikan formal. Integrasi ini disusun untuk mengakomodasi peran pesantren sebagai basis utama pembentukan karakter santri sekaligus menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat modern. Landasan kurikulum tersebut berpijak pada tujuan dasar yang dikenal sebagai trilogi pendidikan.

Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan selaras dengan penguatan iman dan takwa secara mendalam. Kedua, pembentukan akhlak al-karimah sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, sebagai instrumen penting dalam merespons dinamika global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental pendidikan Islam yang menjadi sokoguru pesantren.

Melalui kerangka tersebut, Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah menempatkan modernisasi bukan sebagai bentuk pergeseran nilai,

melainkan sebagai strategi adaptif untuk memastikan relevansi, daya saing, dan kontribusi kelembagaan di tengah perubahan zaman.

2. Karakteristik khusus Pondok Pesantren Modern An-Najah Bogor

Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah memiliki orientasi kelembagaan yang kuat terhadap pembaruan sistem pendidikan. Komitmen tersebut tercermin pada kesiapan para pengasuh, pembina, serta tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan reformulasi berbagai sistem yang ada, baik pada aspek pembelajaran, tata kelola kelembagaan, maupun manajemen organisasi. Upaya modernisasi dilakukan secara selektif pada sejumlah subsistem sebagai prasyarat keberlanjutan (*institutional sustainability*) pesantren, khususnya dalam pengelolaan unit pendidikan formal hingga jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu, pesantren menerapkan model kurikulum terintegrasi yang memadukan tradisi kepesantrenan dengan sistem pendidikan formal. Integrasi ini disusun untuk mengakomodasi peran pesantren sebagai basis utama pembentukan karakter santri sekaligus menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat modern. Landasan kurikulum tersebut berpijak pada tujuan dasar yang dikenal sebagai trilogi pendidikan.

Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan selaras dengan penguatan iman dan takwa secara mendalam. Kedua, pembentukan akhlak al-karimah sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, sebagai instrumen penting dalam merespons dinamika global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental pendidikan Islam yang menjadi sokoguru pesantren.

Melalui kerangka tersebut, Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah menempatkan modernisasi bukan sebagai bentuk pergeseran nilai, melainkan sebagai strategi adaptif untuk memastikan relevansi, daya saing, dan kontribusi kelembagaan di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka manajemen pendidikan berbasis masyarakat pada pondok pesantren, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan lulusan, menjadi akar dari permasalahan ini. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Manajemen Pendidikan Masyarakat untuk Meningkatkan *Life Skills* Kewirausahaan Lulusan pada Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Jakarta dan Pondok Pesantren An-Najah Bogor).”

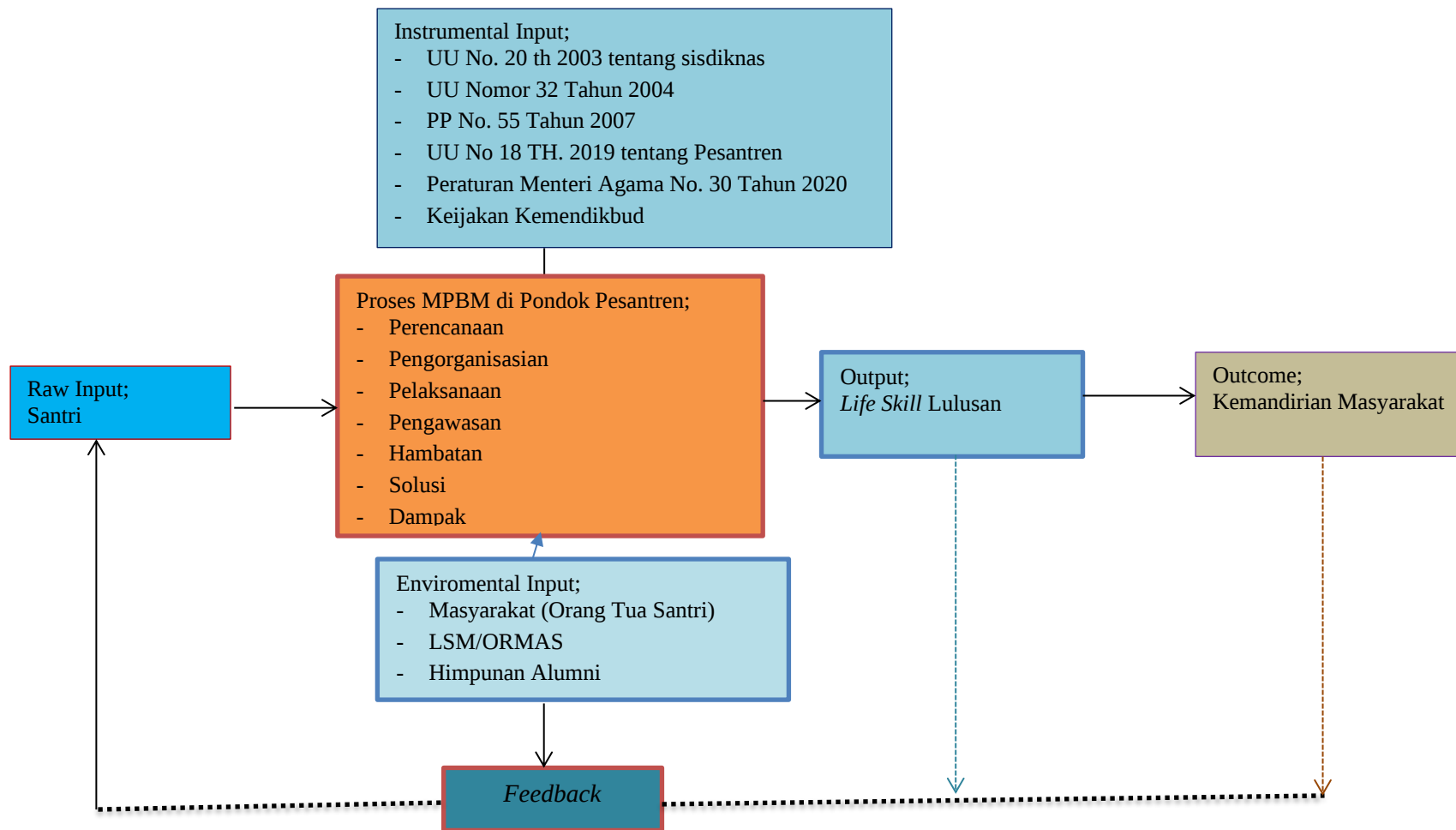
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Pesantren berkembang secara organik dalam sistem pendidikan nasional dan telah lama dipandang sebagai lembaga yang khas sekaligus dipercaya masyarakat. Kehadirannya lahir dari prakarsa tokoh-tokoh lokal, tumbuh mandiri sebagai institusi budaya, serta memegang posisi strategis dalam kehidupan sosial. Pesantren berfungsi sebagai pusat pengembangan pemikiran keagamaan, pencetak sumber daya manusia, dan agen pemberdayaan masyarakat. Di tengah dinamika zaman, ia juga menjadi bagian dari arus perubahan sosial.

Perkembangan kebutuhan dunia kerja memunculkan penyesuaian nilai di lingkungan pesantren. Lulusan tidak lagi cukup dibekali kompetensi keagamaan semata, karena tidak semuanya akan berperan sebagai ulama atau pemuka agama. Namun praktik pendidikan yang berjalan selama ini masih banyak menitikberatkan pada kurikulum religius sehingga keterampilan di luar bidang tersebut relatif terbatas. Karena itu, penguatan kecakapan hidup menjadi kebutuhan penting. Pembekalan kemampuan praktis dan keterampilan kerja perlu diberikan agar para santri lebih siap beradaptasi dan berperan aktif dalam masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, agar memberikan gambaran dalam memahami proses dan langkah-langkah pada penelitian ini, maka kerangka pikir penelitian ini (*research framework*) digambarkan sebagaimana disajikan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1: Perumusan Masalah

Dari gambar tersebut di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. *Raw input*, adalah santri santri dengan karakteristik perbedaan latar belakang keluarga yang meliputi: sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi motivasi belajar dan kemandirian. Usia dan jenjang pendidikan memberikan dampak pada potensi, minat, dan bakat santri. Demikian pula pengalaman pendidikan sebelumnya berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan dan lain sebagainya.
2. *Process* (proses) merupakan mobilisasi dari semua komponen input secara sistematis dan sistematis melalui manajemen untuk mencapai tujuan. Kualitas proses bergantung pada kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kualitas komponen internal pesantren adalah kualitas sumber daya pesantren, dan kualitas eksternal adalah daya dukung lingkungan pesantren, kualitas pengelolaan adalah penerapan manajemen dengan langkah-langkah yang tepat pada tujuan. Dalam manajemen langkah-langkah tersebut melalui perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan evaluasi didasari grand theory manajemen menurut George R. Terry, serta mencari solusi perbaikan apabila terdapat hambatan dan kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesantren.
3. *Output* merupakan keluaran dari hasil proses dalam suatu waktu yang telah ditetapkan dan sesuai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya *Life Skill* Kewirausahaan Lulusan pada pondok pesantren, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.
4. *Outcome* merupakan nilai yang dihasilkan dari keluaran sebagai dampak baik yaitu lulusan yang memiliki *life skill* kewirausahaan sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup yang didasari oleh nilai-nilai agama.
5. *Feedback* adalah model konseptual manajemen pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan *life skill* kewirausahaan santri pada pesantren, sebagai sistem berkelanjutan, dan

dapat meningkatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program. Umpan balik diberikan sedemikian sehingga pengelola pesantren dapat memahami temuan, mengubah perilaku yang teridentifikasi dan mempraktekan panduan yang diberikan sebagai upaya perbaikan.

6. *Instrumental input*, merupakan komponen atau unsur yang menjadi landasan dan pendukung proses berupa kebijakan pemerintah di antaranya: Undang-undang No. 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2007, Undang-undang No 18 Tahun. 2019, PMA No. 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan Pesantren serta Kebijakan Kemendikbud dalam meningkatnya pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* santri pada pesantren.
7. *Environmental input*, merupakan lingkungan eksternal pesantren yang mempengaruhi sebuah proses, terdiri dari lingkungan pesantren, masyarakat sekitar pesantren dan atau orang tua santri, LSM/ORMAS dan stakeholder untuk dukungan materil dan non materil.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permusan masalah tersebut, maka aspek-aspek yang diteliti dibatasi pada:

- a. Perencanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan pondok pesantren meliputi: a) merancang program, b) menyusun rencana pelatihan kewirausahaan, c) menetapkan tujuan program kemitraan antara pesantren dan masyarakat, d) mengidentifikasi sumber daya.
- b. Pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan pondok pesantren meliputi: a) membentuk tim pelaksana program pendidikan berbasis masyarakat di pesantren, b) menyusun struktur kerja sama antara pesantren dan masyarakat, c) mengatur pembagian tugas, d) mengelola sumber daya pesantren.

- c. Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan pondok pesantren meliputi: a) melaksanakan pelatihan keterampilan hidup (*Life Skill*), b) menjalankan program magang santri di UMKM, c) mengaktifkan kelas-kelas praktik berbasis proyek, d) memfasilitasi pendampingan mentoring usaha.
- d. Pengawasan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan pondok pesantren meliputi: a) menentukan jenis dan teknik evaluasi, b) mengukur keberhasilan program, c) memantau keberlanjutan program kerja dengan masyarakat dan UMKM, d) umpan balik dari masyarakat.
- e. Kendala pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan pondok pesantren meliputi: a) keterbatasan sarana prasana pendukung, b) sumber daya manusia guru yang terfokus pada bidang keagamaan, c) partisipasi masyarakat, d) perbedaan kemampuan santri.
- f. Solusi mengatasi kendala manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan *life skill* lulusan pesantren meliputi: a) mengintegrasikan *life skill* secara sistematis ke dalam kurikulum pesantren tanpa mengorbankan pendidikan agama, b) mengembangkan program yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk literasi digital dan kewirausahaan, dan c) meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui program *life skill* yang aplikatif.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan *Life Skills* kewirausahaan lulusan pada Pondok Pesantren.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk memperoleh gambaran, mendiskripsikan dan menganalisis tentang:

- 1) Perencanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.
- 2) Pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.
- 3) Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.
- 4) Pengawasan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.
- 5) Kendala pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.
- 6) Solusi mengatasi kendala pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkat *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan mengembangkan kajian disiplin ilmu manajemen pendidikan tentang manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan *life skill* kewirausahaan lulusan pada pondok pesantren, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kosep ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mengembangkan kemandirian lulusan.

b. Manfaat secara praktis:

1) Bagi Kementerian Agama

Menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan pendidikan pesantren dan menjadi referensi bagi Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam penguatan program life skill pesantren, dan mendukung implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terutama pada aspek pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pesantren, dan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi multipihak dalam pembangunan SDM berbasis nilai-nilai keislaman pada pesantren.

2) Bagi pengelola pondok pesantren

Memberikan gambaran tentang strategi pengembangan manajemen pendidikan sekolah berbasis pada pesantren, sehingga terjadi optimalisasi peran masyarakat dalam pendidikan santri dan pesantren memperoleh strategi konkret dalam melibatkan masyarakat (orang tua, alumni, UMKM, tokoh lokal) untuk penguatan life skill santri.

3) Bagi guru pontren

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi guru untuk peningkatan profesionalisme SDM pesantren terutama mendorong ustaz dan pengelola untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal secara terencana dan berkelanjutan, dalam meningkatkan mutu pondok pesantren yang dibuktikan dengan lulusan yang memiliki *life skill* sesuai dengan tuntutan.

4) Bagi Santri

Dapat meningkatkan kesiapan hidup di masyarakat, sehingga santri tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga adaptif terhadap perubahan sosial dan dunia kerja. Selain itu, santri dapat melakukan penguatan *soft skill* dan *hard skill* meliputi kepemimpinan, komunikasi, problem solving, kewirausahaan, serta keterampilan teknis sesuai potensi lokal.

5) Bagi masyarakat

Meningkatkan peran masyarakat dalam manajemen pendidikan di pesantren dalam membekali santri dengan *life skill* yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

6) Bagi penelitian selanjutnya

Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skills* bagi lulusan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permusan masalah tersebut, maka aspek-aspek yang menjadi pertanyaan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?
4. Bagaimana pengawasan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?
5. Apa kendala pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan *life skill* lulusan di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?
6. Bagaimana solusi mengatasi kendala pendidikan berbasis masyarakat dalam meningkatkan *life skill* santri di pontren Ash-Shiddiqiyah Jakarta dan Pontren Modern An-Najah Bogor?